



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KB  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

<b>KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA</b>	<b>:</b>	<b>BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)</b>
<b>UNIT ESELON I</b>	<b>:</b>	<b>DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>:</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA KERJASAMA INTERNASIONAL BKKBN</b>
<b>HASIL</b>	<b>:</b>	<b>MENINGKATNYA KUALITAS SDM APARATUR PENYELENGGARA PROGRAM, KERJASAMA INTERNASIONAL SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK</b>
<b>UNIT ESELON II</b>	<b>:</b>	<b>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KB</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>:</b>	<b>MENINGKATNYA KESERTAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM APARATUR KEPENDUDUKAN DAN KB</b>
<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>:</b>	<b>1. INDEK KEPUASAN USER (USER/PENGGUNA PESERTA DIKLAT) ATAS PENYELENGGARAAN DIKLAT 2. PERSENTASE SDM APARATUR DAN TENAGA FUNGSIONAL YANG TERLATIH 3. PERSENTASE BALATBANG DAN UPT BALAI DIKLAT KEPENDUDUKAN DAN KB YANG TERSTANDARISASI 4. JUMLAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM APARATUR DAN TENAGA FUNGSIONAL 5. JUMLAH ASESMEN YANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA DIKLAT AKREDITASI 6. JUMLAH JEJARING KEMITRAAN DAN KERJASAMA DALAM KEDIKLATAN YANG OPERASIONAL</b>
<b>SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN KEGIATAN</b>	<b>:</b>	<b>INDEK, ORANG, KEGIATAN DAN DOKUMEN</b>
<b>VOLUME</b>	<b>:</b>	<b>1. INDEK 3 (SKALA 1 – 4) 2. 50 PERSEN DAN 3.385 ORANG 3. 80 PERSEN 4. 14 PEDOMAN DAN 10 KURIKULUM 5. 12 KEGIATAN ASESMEN 6. 4 MITRA KERJA</b>

## A. Latar Belakang

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019)Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013;
- e. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;
- f. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 / PMK.02 / 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
- h. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- i. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
- j. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
- k. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Teknis

### 2. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung perubahan lingkungan strategis program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di era RPJMN 2015 – 2019, maka diperlukan program-program terobosan yang inovatif dan perbaikan kualitas dan profesionalisme Penyelenggaraan Diklat. Tujuan utama adalah untuk mempercepat dan mengoptimalkan capaian dan kinerja program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Di satu sisi, tantangan Program KKBPK pada RPJMN 2015 – 2019 memiliki target-target sasaran yang lebih detail dan menantang untuk mensukseskan rencana pembangunan secara nasional. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga perlu

mengeluarkan kebijakan dan strategi program yang mampu mempercepat visi dan misi program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Salah satu upaya yang perlu disiapkan untuk mempercepat tercapainya visi dan misi program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yaitu peningkatan kompetensi bagi para pengelola dan pelaksana program di berbagai tingkatan melalui Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan siklusnya dimulai dari peninjauan kebutuhan Diklat, lalu perancangan perangkat Diklat yang meliputi kurikulum, modul/bahan ajar dan media pembelajaran. Selanjutnya perencanaan Diklat dan pelaksanaan Diklat. Tahapan terakhir dari pelaksanaan Diklat adalah pelaksanaan evaluasi Diklat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga aparatur dan tenaga program menjadi rencana strategis dalam Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun kedepan. Kegiatan-kegiatan Diklat yang beragam seperti orientasi, seminar, kursus, outbound dll selalu diikuti dengan pedoman, panduan dan perangkat sebagai acuan dalam penyelenggaraan Diklat tersebut yang dimaksud. Selain itu untuk dapat menciptakan tenaga terlatih yang berkualitas diperlukan proses penyelenggaraan Diklat, Orientasi, Seminar, Kursus yang terstandar melalui akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat KKBPK.

## **B. Kebijakan Program**

Dalam rangka menjadikan Pusdiklat Kependudukan dan KB sebagai Lembaga Diklat yang terakreditasi untuk meningkatkan kualitas SDM dan maka kebijakan program Pusdiklat KKB tahun 2016 adalah :

1. Meningkatkan kebijakan dan perangkat kediklatan Kediklatan
2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional
3. Meningkatkan standarisasi Balatbang dan Balai Diklat KKB
4. Meningkatkan pelaksanaan *assessment* akreditasi Diklat
5. Meningkatkan kerjasama kediklatan dengan mitra kerja
6. Meningkatkan pembinaan dan monitoring evaluasi Diklat

## **C. Penerima manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pelatihan SDM KKB : pengelola dan pelaksana program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

## **D. Strategi Pencapaian Keluaran**

1. Metoda Pelaksanaan  
Kegiatan dilaksanakan cara swakelola dan kontrak.

## 2. Tahapan dan Cara Pelaksanaan

Tahapan dan cara pelaksanaan dilakukan dengan cara : persiapan, penyelenggaraan dan Evaluasi kegiatan. Rincian tahapan kegiatan dijelaskan lebih lanjut pada setiap penjelasan sub kegiatan.

### **E. Keluaran : SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional Meningkatkan Kualitasnya**

#### **1. Peningkatan Kepuasan User (User/Pengguna Peserta Diklat) Atas Penyelenggaraan Diklat**

##### a. Penyusunan Peta Kerja dan Rencana Kebutuhan Diklat

##### 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Diklat

Penyusunan rencana kerja dan strategi diklat ini akan menghasilkan pola yang diaplikasikan pada penyelenggaraan pelatihan, orientasi atau diseminasi. Oleh karena itu, dalam satu tahun anggaran, kegiatan ini dibutuhkan minimal 2 kali dengan melibatkan komponen terkait, sehingga terbentuk suatu organisasi pembelajaran yang efektif.

Dalam kaitannya dengan pengembangan program diklat, fokus strategi operasional pelatihan mengarah pada proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan pelatihan. Dimulai dari sasaran pelatihan, substansi, proses belajar mengajar, metoda, media yang digunakan, proporsi teori dengan praktek sampai dengan tindak lanjut.

Penerima manfaat dari kegiatan Penyusunan Rencana kerja dan Strategi Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM KKB dan Juga Kebijakan Prioritas Pemerintah.

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui Brainstorming, Diskusi, Curah Pendapat. Sedangkan Tahapan pelaksanaan antara lain :

- Arahan pimpinan kaitan kebijakan dan strategy pokok program pemerintah dan Kementerian/Lembaga
- Mendapatkan ancar-ancar pagu sementara dari Deputi Bidang Latbang BKKBN Pusat
- *Membreak-down* Program dan Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Proritas pemerintah dengan Pagu Definitif yang ada.

Waktu pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja dan Strategi Diklat ini adalah pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.129.400.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

##### 2) Analisis Data Perencanaan Diklat

Kegiatan penyusunan analisis data perencanaan program diklat merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengembangan manajemen diklat dalam upaya untuk menggali berbagai perencanaan program dan kegiatan untuk mengintervensi kesenjangan yang terjadi di lapangan yang dapat menghambat kelangsungan operasionalisasi program KKBPK. Akan dilihat tingkatan prioritas

kebutuhan berdasarkan urgensi dari masing-masing kediklatan seluruh pusat dan provinsi. Penerima manfaat dari kegiatan Penyusunan Analisis Data Perencanaan Pelatihan adalah Pusdiklat KKB dan Provinsi.

Metode pelaksanaan dalam penyusunan analisis data perencanaan program Diklat ini melalui penghitungan data basis yang dimiliki. Waktu pelaksanaan Penyusunan Analisis Data Perencanaan Pelatihan ini adalah pada bulan november – desember tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.24.210.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

b. Fasilitas Pembinaan Balatbang dan UPT Balai Diklat KKB

1) Konsolidasi Bidang Program KKBPK Nasional

Mengacu pada Hasil Rumusan Rakernas Program KKBPK 2016 perlu adanya kegiatan Konsolidasi Bidang Program KB Nasional yang diharapkan dapat Terkonsolidasinya Program-Program Strategis Bidang Pelatihan dan Pengembangan sebagai *supporting unit/service center* wahana peningkatan kapasitas SDM pengelola Program KKBPK.

Penerima manfaat dari kegiatan Konsolidasi Bidang Program KKBPK ini adalah Program KKBPK secara keseluruhan. Waktu pelaksanaan Konsolidasi Bidang Program KKBPK ini adalah tahun anggaran 2016 Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.54.520.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

2) Capacity Building dan Konsultasi Kepala Seksi Program KKBPK

Mengacu pada Hasil Konsolidasi Bidang Program KB Nasional 2015 perlu adanya kegiatan Konsultasi Kepala Seksi Program KKBPK yang diharapkan dapat Terkonsolidasinya Program-Program Strategis Bidang Pelatihan dan Pengembangan sebagai *supporting unit/service center* wahana peningkatan kapasitas SDM pengelola Program KB.

Penerima manfaat dari kegiatan Konsultasi Kepala Seksi Program KB Nasional ini adalah Program KB Nasional secara keseluruhan dan Kepala Seksi di Kedepatian Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan secara khusus. Waktu pelaksanaan Konsultasi Kepala Seksi Program KB Nasional ini adalah tahun anggaran 2016 dan akan dilaksanakan di Kalimantan Barat Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.88.100.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

3) Konsultasi Nasional Peningkatan Kinerja Widyaiswara

Dalam rangka memantapkan kinerja Widyaiswara, diperlukan pertemuan-pertemuan konsultasi yang bersifat Nasional melibatkan seluruh widyaiswara Pusat dan Provinsi dengan mengundang Narasumber dari instansi pembina Widyaiswara yaitu LAN RI. Hal tersebut untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kewidyaiswaraan seperti angka kredit dan lainnya. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Widyaiswara dari BKKBN Pusat dan Provinsi. Kegiatan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Total

biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.060.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

4) Administrasi Pengelola Anggaran

Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap proses pencapaian visi dan misi program KB secara nasional. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang cermat dan professional, baik dari aspek manajemen maupun teknis administratif dari pengelola kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan SK Kepala BKKBN. Dengan demikian diharapkan penanganan administrasi dan manajemen keproyekan dapat memenuhi syarat akuntabilitas, tertib, lancar dan layak dipertanggung jawabkan.

Penerima manfaat dari kegiatan Pengelolaan anggaran ini adalah Pembayaran honorarium setiap bulan kepada pengelola kegiatan Satker Deplatbang. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran ini dengan Pembayaran Honorarium bulanan dari Bendahara SATKER. Waktu pelaksanaan Pengelolaan Anggaran ini adalah setiap bulan pada tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.241.320.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016

5) Penilaian Angka Kredit Widyaiswara

Hasil-hasil kegiatan dibuat dalam bentuk berkas yang dihimpun dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Pedoman Penetapan Angka Kredit yang diterbitkan oleh LAN RI. Berkas dan dokumen dikirimkan kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara di Pusat untuk dilakukan penilaian dan penentuan angka kredit yang diberikan bagi Widyaiswara yang bersangkutan.

Penerima manfaat dari kegiatan penilaian angka kredit widyaiswara ini adalah Para Widyaiswara BKKBN. Metode pelaksanaan dalam kegiatan penilaian angka kredit widyaiswara ini adalah melalui Proses penilaian berkas dilakukan 3 kali dalam setahun sesuai peraturan penetapan angka kredit. Sedangkan Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Para WI mengirimkan DUPAK-nya kepada Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Pusat, untuk dianalisis dan di-*feedback*-an kembali Penetapan Angka Kreditnya.

Waktu pelaksanaan penilaian angka kredit widyaiswara ini adalah selama tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.54.400.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016

6) Pengadaan Paket Pendukung Pelatihan

Berbagai kegiatan pelatihan yang dilakukan memerlukan sarana pendukung pelaksanaan seperti *audio visual* diklat dan *training kit* yang diberikan kepada seluruh peserta latih.

Penerima manfaat dari kegiatan Pengelolaan anggaran ini adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB karena lancarnya proses pelatihan. Metode pelaksanaan dalam pengadaan paket pendukung pelatihan ini

adalah swakelola. Waktu pelaksanaan kegiatan ini tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.393.250.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

7) Pemeliharaan Sarana Diklat

Operasi & Pemeliharaan Fasilitas (Opf) Pendidikan dilaksanakan sebagai upaya penunjang efektifitas kerja. Dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar dalam pelatihan atau pertemuan lainnya perlu dibantu dengan peralatan yang layak pakai seperti LCD, *Overhead Projector*, *Digital Camera*, *PA Wireless*, *Notebook*, dll. Oleh karena itu frekuensi pemakaian peralatan tersebut sangat tinggi sehingga komponen-komponennya sangat mungkin terganggu yang pada akhirnya akan mengganggu kelancaran proses belajar mengajar.

Penerima manfaat dari kegiatan Pengelolaan anggaran ini adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB karena lancarnya proses belajar mengajar. Metode pelaksanaan dalam pemeliharaan sarana diklat ini dengan memanggil teknisi, membeli atau mengganti komponen/peralatan yang rusak atau *service* rutin mesin fotocopy. Adapun tahapan pelaksanaannya antara lain dengan menghubungi teknisi bila sewaktu-waktu ada kerusakan. Waktu pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Diklat ini adalah setiap bulan pada tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.67.500.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

8) Pencetakan Sertifikat dan Cover Sertifikat Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan prima bidang kediklatan dibutuhkan adanya sertifikasi pelatihan bagi setiap peserta yang mengikuti pelatihan. Secara fungsional Puslat Pegawai dan Balatbang/Balai diklat KBN secara rutin menyelenggarakan berbagai kategori atau jenis pelatihan secara bertingkat mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat lini lapangan. Penerima manfaat dari kegiatan pencetakan Leafled Informasi pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Metode Pelaksanaan Pengadaan pencetakan sertifikat pelatihan ini dilakukan dengan metode penunjukkan langsung. Waktu pelaksanaan pencetakan sertifikat dan cover sertifikat pelatihan ini adalah pada Triwulan I (satu) tahun 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.26.000.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

9) Pencetakan Laporan Diklat

Pelaporan diklat dilaksanakan dengan memuat rencana pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang sudah dilakukan per kegiatan, triwulanan sampai dengan tahunan, dan pelaporan pelaksanaan anggaran, yang setiap akhir tahun instansi/lembaga pemerintah tersebut berkewajiban untuk melaporkan apa yang telah dilakukan serta hasilnya yang telah dicapai dalam periode tahun tersebut.

Penerima manfaat dari pelaporan Diklat ini adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB karena mendapatkan alat kontrol pelaksanaan kegiatan Diklat di daerah-daerah. Serta pelaporan diklat juga berfungsi dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pusat Pelatihan dan Pendidikan.

Waktu pelaksanaan pencetakan pelaporan diklat ini adalah setiap Triwulan, tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 54.000.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

#### 10) Pengelolaan Asrama Diklat

Dalam meningkatkan pelayanan prima dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan diklat yang efektif dan dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar dalam pelatihan Penerima manfaat dari kegiatan Pengelolaan anggaran ini adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB karena lancarnya proses belajar mengajar. Metode pelaksanaan dalam pengelolaan asrama diklat ini dengan menjaga kebersihan asrama diklat dengan didukung staf pengelola asrama yang professional sehingga peserta. Ada diklat mendapatkan kenyamanan dalam mengikuti diklat. Waktu pelaksanaan Pengelolaan asrama diklat ini adalah setiap bulan pada tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.004.590.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016

#### 11) Pembinaan Program KB di Wilayah Binaan

Daftar Provinsi Wilayah Binaan Pejabat Eselon I, Eselon II dan Fungsional untuk melakukan kegiatan Pemantauan Strategis Pengelolaan Program KB Nasional. Penyelenggaraan Program KB dewasa ini, terutama pada era desentralisasi ini tidak terlepas dari isu-isu dan permasalahan serta kendala yang terjadi. Sehingga pemantauan langsung ke wilayah Provinsi Binaan yang bersifat strategis dan Intens perlu dilakukan agar penyelenggaraan Program KB khususnya di Wilayah Provinsi sesuai dengan arah kebijakan Program KB Nasional.

Penerima manfaat dari kegiatan Pembinaan Program KB di Wilayah Binaan adalah BKKBN Provinsi yang menjadi wilayah binaan. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah dengan Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan Pejabat Struktural setempat, Menganalisis Data pelaksanaan program KB Nasional di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.

Waktu pelaksanaan Pembinaan Program KB di Wilayah Binaan ini adalah pada tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.60.880.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

#### 12) Pembinaan Wilayah Eselon I

Masing-masing Eselon I memiliki wilayah binaan yang akan dibina dan dipantau perkembangannya sehingga terus dapat meningkatkan kinerjanya. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui perjalanan eselon I dan pertemuan pembinaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari selama 3 kali pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 41.130.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

### c. Evaluasi Paska Diklat

#### 1). Evaluasi Paska Diklat

Kegiatan pelatihan yang berlangsung di seluruh Indonesia merupakan suatu program yang terintegrasi dengan program yang dimiliki Pusdiklat. Pelaksanaan kegiatan pelatihan memerlukan evaluasi secara terus menerus untuk memastikan keefektifan dan keberhasilan pencapaian program Pelatihan. Hal ini merupakan bagian dari suatu siklus kediklatan. Selanjutnya juga diperlukan suatu rencana atau tindakan yang akan dilaksanakan Latbang seluruh provinsi untuk meningkatkan kinerja diklat ke depan. Kegiatan Evaluasi Paska Diklat ini adalah proses pengumpulan data awal di beberapa provinsi yang selanjutnya dianalisa untuk evaluasi paska diklat.

Penerima manfaat dari kegiatan Evaluasi Paska Pelatihan ini adalah Pusdiklat dan Latbang seluruh Indonesia. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah tahun anggaran 2016 di 5 provinsi. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.61.000.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016

#### 2). Rapat Persiapan dan Laporan Evaluasi Paska Diklat

Dalam rangka mempersiapkan dan mendukung agar kegiatan evaluasi pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dalam memastikan keefektifan dan keberhasilan pencapaian program Pelatihan tercapai.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pusdiklat sehingga akan didapat hasil Evaluasi Paska Diklat yang memiliki kegunaan dalam meningkatkan efektifitas dari tujuan pelaksanaan Diklat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.36.400.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016

#### 3). Tindak Lanjut Perkembangan Alumni Diklat

Kegiatan pelatihan yang berlangsung di seluruh Indonesia merupakan suatu program yang terintegrasi dengan program yang dimiliki Pusdiklat. Untuk memastikan keefektifan dan keberhasilan pencapaian tujuan Pelatihan terhadap peserta diklat selanjutnya juga diperlukan suatu rencana atau tindakan yang akan dilaksanakan Pusdiklat untuk mengetahui kinerja peserta diklat dalam lingkungan mereka bekerja. Kegiatan ini adalah proses monitoring tindak lanjut alumni pesertra diklat di beberapa provinsi yang selanjutnya dianalisa untuk evaluasi peserta paska diklat.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pusdiklat dan Latbang seluruh Indonesia. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah tahun anggaran 2016 di 10 provinsi. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.431.520.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016

### d. Monitoring Diklat

#### 1) Monitoring Diklat

Tantangan Provinsi monitoring Diklat dewasa ini, terutama pada era desentralisasi ini tidak terlepas dari isu-isu dan permasalahan serta kendala yang terjadi dalam diklat. Sehingga pemantauan langsung ke diklat Provinsi yang bersifat strategis

dan Intens perlu dilakukan agar penyelenggaraan Program KKBPk khususnya di Wilayah Provinsi sesuai dengan arah kebijakan Program KKBPk Nasional.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah BKKBN Provinsi yang menjadi wilayah monitoring. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah dengan Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan Pejabat Struktural setempat, Menganalisis Data pelaksanaan diklat program KB Nasional di 5 Provinsi.

Waktu pelaksanaan monitoring ini adalah pada tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.56.000.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

e. Pengembangan Hasil Monitoring dan Evaluasi Diklat KKBPk

1). Rapat Penyusunan Laporan Monev Diklat

Rapat koordinasi antar komponen program dan teknis terkait perencanaan sampai dengan pelaksanaan program dilakukan dalam rangka menyusun laporan monev diklat yang baik sehingga dapat efektif menjadi alat kontrol dan keefektifan tercapainya tujuan pelaksanaan diklat.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pusdiklat KKB sehingga dapat dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas pelatihan di masa datang

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah pada tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.69.720.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

## **F. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional**

a Pelatihan Bagi SDM Aparatur

1) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, perubahan struktur kelembagaan, tuntutan demokratisasi, keterbukaan, perubahan lingkungan strategis, dan lain sebagainya sangat berpengaruh terhadap proses manajemen program KKBPk secara keseluruhan, terutama dalam upaya merealisasikan visi dan misi program KKBPk Nasional. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang tengah berproses mengharuskan BKKBN mengambil inisiatif dalam bidang tugasnya. terutama pada penyiapan kemampuan manajerial dan kepemimpinan para pegawai pada semua tingkatan agar mampu memberikan pelayanan maksimal.

Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam Diklatpim IV ini adalah dalam rangka melatih Calon Pejabat Struktural Eselon IV atau yang sudah menduduki jabatan untuk mengikuti Diklat Perjenjangan. Persyaratan administratifnya adalah : Kepada para staf yang akan dipromosi ke eselon IV atau eselon IV yang sudah menduduki jabatan tetapi belum dilatih.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan tahun 2016 menggunakan dengan pola baru sesuai dengan Perka LAN No. 13 tahun 2013. Dengan adanya Penyelenggaraan Diklatpim IV pola baru ini diharapkan Mutu kepemimpinan para pejabat struktural BKKBN meningkat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya. Adapun Tujuan daripada Penyelenggaraan Diklatpim IV ini adalah Meningkatkan kompetensi kepemimpinan para pejabat struktural BKKBN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya. Waktu pelaksanaan Diklatpim IV ini adalah pada tahun anggaran 2016. Jumlah Peserta Diklatpim IV ini adalah sebanyak 33 orang dalam 3 angkatan (sebanyak 99 orang). Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.565.515.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

2) Diklat Kepemimpinan Tingkat III

PP RI nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Mewajibkan setiap pejabat struktural yang sedang menduduki jabatan struktural untuk mengikuti Diklat PIM sesuai tingkatan jabatannya. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, perubahan struktur kelembagaan, tuntutan demokratisasi, keterbukaan, perubahan lingkungan strategis, dan lain sebagainya sangat berpengaruh terhadap proses manajemen program KKBPK secara keseluruhan, terutama dalam upaya merealisasikan visi dan misi program KB Nasional. Pejabat Struktural pada semua tingkatan diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal dan perlunya penyiapan kader pengganti dalam jabatan yang kosong sebagai akibat dari pejabat yang mutasi dan pensiun.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III tahun 2015 menggunakan dengan pola baru sesuai dengan Perka LAN No. 12 tahun 2013. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Diklatpim III ini adalah melatih Pejabat Struktural Eselon III atau yang sudah menduduki jabatan untuk mengikuti Diklat Perjenjangan. Persyaratan administratifnya adalah :Eselon III yang sudah menduduki jabatan tetapi belum dilatih. Waktu pelaksanaan Penyelenggaraan Diklatpim III ini adalah pada tahun anggaran 2015. Jumlah Peserta Diklatpim III ini adalah sebanyak 10 orang yang akan dikirim ke diklat Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) atau diklat pemerintah lain. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 241.250.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2015.

3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Penerima manfaat dari kegiatan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II ini adalah Para calon/pejabat struktural Eselon II BKKBN. Metode pelaksanaan dimulai dengan melakukan Pendataan dan Seleksi Calon Peserta Diklat PIM II dan mengirimkan ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mengikuti Diklat.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Diklatpim II menggunakan metode pola baru ini tahun anggaran 2016. Jumlah Peserta untuk pengiriman Diklatpim II ini adalah sebanyak 9 orang. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.344.349.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

4) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar Aparatur BKKBN

Setiap aparatur BKKBN memiliki kompetensi dasar yang menjadi standar dalam pelaksanaan pekerjaannya di setiap bidang. Seluruh pegawai, dimulai dari level fungsional umum perlu memenuhi kompetensi dasar tersebut.

Pelatihan yang memiliki sasaran para pegawai BKKBN, terutama level staf (fungsional umum) menggunakan metode pembelajaran di luar kelas dan praktek sehingga memicu pemahaman lebih mendalam dalam kegiatan Diklat.

Tahapan pelaksanaannya dimuali dengan rapat persiapan untuk mengidentifikasi kompetensi yang akan dilatih dan peserta yang akan ditingkatkan kompetensinya. Selanjutnya adalah pengelolaan administrasi pelatihan. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari dalam 9 (sembilan) angkatan di Jawa Barat sebanyak 360 orang pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 2.188.770.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

- 5) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar Kelembagaan Bidang Mission Center  
Pembagian tugas dan fungsi BKKBN menjadi 2 bagian besar yaitu bidang operasional atau *Mission Center* dan bidang bidang pendukung atau *Support Centre*. Sesuai dengan pembagian tersebut, diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dasar sesuai dengan bidang pekerjaannya sehingga tujuan program dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2015, Pusdiklat KKB telah menyusun beberapa kurikulum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi *Mission Centre*. Sekaitan dengan itu, Pelatihan akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan sasaran SDM Aparatur di *Mission Center*, yaitu Kedepuitan KB KR dan Kedepuitan KSPK, sebanyak 4 angkatan (1 angkatan 40 orang). Pelatihan akan dilaksanakan di kantor BKKBN Pusat selama 5 (lima) hari. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 313.370.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

- 6) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar Kelembagaan Bidang *Service Center*  
Pembagian tugas dan fungsi BKKBN menjadi 2 bagian besar yaitu bidang operasional atau *Mission Centre* dan bidang bidang pendukung atau *Service Center*. Sesuai dengan pembagian tersebut, diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dasar sesuai dengan bidang pekerjaannya sehingga tujuan program dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2015, Pusdiklat KKB telah menyusun beberapa kurikulum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi *Service Center*. Sekaitan dengan itu, Pelatihan akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan sasaran SDM Aparatur di *Service Center*, yaitu Kedepuitan Bidang Latbang, Kedepuitan ADPIN, Sekretaris Utama dan Inspektorat Utama, sebanyak 4 angkatan (1 angkatan 40 orang). Pelatihan akan dilaksanakan di kantor BKKBN Pusat selama 5 (lima) hari. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 314.120.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

- 7) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Umum  
Menindaklanjuti hasil analisis kebutuhan diklat yang dilaksanakan pada tahun 2015 oleh Pusdiklat, maka dihasilkan informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh

para pegawai BKKBN. Seluruh pegawai perlu memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan dalam setiap jabatannya.

Pelatihan yang mensasarkan pegawai BKKBN Pusat dan Provinsi menggunakan metode seperti outbound dan praktik memicu seluruh peserta untuk berproses dalam kegiatan Diklat. Tahapan pelaksanaan adalah dimulai dengan rapat persiapan.

Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan rapat persiapan untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan dan mengidentifikasi pengajar yang mampu memfasilitasi dan mengintervensi kompetensi sesuai kebutuhan.. Selanjutnya adalah pengelolaan administrasi pelatihan. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dalam 4 (empat) angkatan di Jakarta sebanyak 140 orang pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 639.856.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

8) Capacity Building Kepemimpinan Program KKBPK

Mengikuti perkembangan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga pada RPJMN 2015 – 2019, maka diperlukan peningkatan kompetensi bagi para pengelola program KKBPK di tingkat Pusat maupun Provinsi. Kegiatan dilaksanakan dengan metode seminar, diskusi tanya jawab dan kunjungan lapangan melihat operasional program di lini lapangan. Tahapan penyelenggaraan dimulai dengan mengidentifikasi sasaran peserta dan materi substansi dan selanjutnya adalah pengelolaan administrasi penyelenggaraan Diklat. Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari dalam 1 angkatan dengan total peserta 80 orang dan lokasi kegiatan di Provinsi DI Yogyakarta. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 264.330.000- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

9) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Penerima manfaat dari pelatihan ini adalah para pegawai BKKBN. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan dengan swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB dengan mengirimkan peserta ke Lembaga Diklat yang menyelenggarakan kompetensi sesuai kebutuhan bidang tugas. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan menginformasikan keseluruhan pegawai mengenai alokasi kegiatan ini, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pegawai, lalu menganalisis urgenitas dari kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai. Pelatihan ini akan dilaksanakan untuk mengakomodir 60 orang peserta untuk dikirim ke lembaga diklat professional baik di dalam kota Jakarta maupun luar kota pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 606.900.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

10) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Analis Kepegawaian

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Analis Kepegawaian ditujukan untuk para SDM Aparatur yang bertugas di Biro Kepegawaian dan Bidang Kepegawaian BKKBN Perwakilan Provinsi. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan analisis kepegawaian di BKKBN sehingga dapat menentukan rencana pengembangan setiap pegawai.

Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan dengan swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan persiapan untuk menentukan pengajar/ provider pelatihan, pemilihan peserta dan persiapan administrasi, penyelenggaraan pelatihan, evaluasi dan penyelesaian administrasi. Pelatihan ini mengakomodir 35 orang peserta dan akan dilaksanakan di Kantor BKKBN Pusat selama 7 hari efektif. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 337.764.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

- 11) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Perencanaan Program dan Anggaran  
Pelatihan ini memiliki sasaran para Perencana Program dan Anggaran BKKBN Pusat dan Provinsi. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan dengan swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan rapat persiapan dengan komponen terkait. Selanjutnya adalah pengelolaan administrasi pelatihan seperti pemanggilan peserta, permintaan pengajar untuk para pengajar dan persiapan untuk pelaksanaan lainnya. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari untuk 70 orang (2 angkatan) di Kantor BKKBN Pusat pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 410.460.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.
- 12) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Penyusunan Legal Drafting  
Pelatihan ini memiliki sasaran para penyusun tata naskah dan pedoman di BKKBN Pusat. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan dengan swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan rapat persiapan dengan komponen terkait. Selanjutnya adalah pengelolaan administrasi pelatihan seperti pemanggilan peserta, permintaan pengajar untuk para pengajar dan persiapan untuk pelaksanaan lainnya. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari untuk 40 orang (1 angkatan) di Kantor BKKBN Pusat pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 69.452.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.
- 13) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Aplikasi Komputer  
Tuntutan kemajuan teknologi mengharuskan setiap orang mengerti penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk itu, setiap SDM Aparatur BKKBN harus memiliki standar kompetensi dalam menggunakan komputer dan aplikasinya.

Pelatihan ini memiliki sasaran para SDM Aparatur baik pusat dan provinsi, terutama pada bidang kerja yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan Informasi Teknologi. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan dengan swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan rapat persiapan dengan komponen terkait. Selanjutnya adalah pengelolaan administrasi pelatihan seperti pemanggilan peserta, permintaan pengajar untuk para pengajar dan persiapan untuk pelaksanaan lainnya. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari efektif untuk 70 orang (2 angkatan) di Kantor

BKKBN Pusat pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 320.760.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

14) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Komunikasi

Sebagai salah satu instansi yang memerlukan koordinasi dengan banyak pihak, kemampuan komunikasi adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh SDM BKKBN. Pelatihan ini memiliki sasaran para SDM Aparatur baik pusat dan provinsi. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan secara swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB dengan mengirimkan ke lembaga diklat profesional. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan rapat persiapan, pemilihan lembaga diklat yang akan dituju sesuai kebutuhan dan pertemuan dengan lembaga diklat tersebut. Selanjutnya adalah pengelolaan administrasi pelatihan seperti pemanggilan peserta, persiapan untuk pelaksanaan lainnya dan evaluasi. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari efektif untuk 90 orang pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 673.800.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

15) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Kediklatan

Arahan Kepala BKKBN dalam berbagai kesempatan agar ada perubahan Mindset ke depan untuk semua pegawai BKKBN, terutama dalam konteks ini Kepala Balatbang sebagai manajer pelatihan di Unit Pelatihan dan Pengembangan di BKKBN Provinsi. Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat yang ditandai oleh persaingan baik lokal maupun global, dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta perubahan dan tuntutan program di tingkat lini lapangan menuntut perbaikan dan penataan manajemen program, maupun peningkatan kualitas operasional program secara menyeluruh.

Selain itu, kegiatan ini juga Sebagai forum yang strategis untuk menyelaraskan arah program yang telah disepakati sehingga peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM, penyediaan data dan informasi maupun pengembangan model dapat dijadikan acuan utama dalam rangka memberikan kontribusi yang nyata bagi pengelolaan program secara efektif dan efisien.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam 3 angkatan dengan total peserta 103 orang di BKKBN Pusat pada tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.063.596.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

16) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Penelitian

Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan para peneliti dan struktural di bidang penelitian dan pengembangan untuk lebih mengerti secara teknis tentang penelitian. Penerima manfaat dari pelatihan ini adalah para pegawai BKKBN terutama di bidang penelitian dan pengembangan baik BKKBN Pusat dan Provinsi. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan Secara swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB dengan mengirimkan peserta ke Lembaga Diklat LIPI atau lembaga diklat profesional lainnya. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan mengadakan rapat persiapan dengan komponen terkait untuk memilih peserta dan

lembaga diklat yang dituj. Selanjutnya adalah persiapan administrasi, penyelenggaraan, evaluasi dan penyelesaian administrasi dan keuangan. Pelatihan ini akan dilaksanakan untuk mengakomodir 40 orang peserta pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 330.000.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

17) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Demografi

Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai BKKBN untuk memahami konsep demografi secara keseluruhan. Penerima manfaat dari pelatihan ini adalah para pegawai baik BKKBN Pusat maupun BKKBN perwakilan Provinsi. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan Secara swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB dengan mengirimkan peserta ke Lembaga Demografi Universitas Indonesia atau lembaga diklat professional lainnya. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan mengadakan rapat persiapan dengan komponen terkait untuk memilih peserta dan lembaga diklat yang dituj. Selanjutnya adalah persiapan administrasi, penyelenggaraan, evaluasi dan penyelesaian administrasi dan keuangan. Pelatihan ini akan dilaksanakan untuk mengakomodir 70 orang peserta pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 817.950.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

18) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Penyusunan LAKIP

Pelatihan peningkatan kompetensi Penyusunan LAKIP ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan para penyusun LAKIP di lingkungan kerja BKKBN Pusat mengenai standar sistematika penyusunan LAKIP. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB. Tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini diawali dengan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai perancang kurikulum pelatihan penyusunan LAKIP dan selanjutnya kegiatan dilaksanakan di Kantor BKKBN Pusat selama 6 hari untuk 40 orang dalam 1 (satu) angkatan. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 328.780.000,- yang dibebankan pada RKAKL-KL tahun anggaran 2016.

19) Capacity Building Peningkatan Budaya Kerja Organisasi bagi Pegawai BKKBN Pusat

Pelatihan ini memiliki sasaran pegawai BKKBN Pusat dan Provinsi. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar dan orientasi yang dilakukan dengan swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan rapat persiapan untuk melakukan persiapan awal dalam pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya adalah pembuatan surat menyurat untuk penyelenggaraan seperti pemanggilan peserta, permintaan pengajar untuk para pengajar dan persiapan untuk pelaksanaan lainnya. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 2 (hari) hari dalam 3 (tiga) angkatan atau 450 orang di Kantor BKKBN Pusat pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.126.750.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

20) Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui On Job Training

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur BKKBN dapat dilakukan melalui pelatihan dalam bentuk klasikal maupun non klasikal. Salah satu bentuk pelatihan non klasikal adalah melalui *On Job Training* dimana peserta akan melakukan praktek dan evaluasi di salah satu bidang yang ditunjuk dengan dibimbing oleh mentor.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan sasaran peserta sebanyak 495 orang di seluruh provinsi. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp 688.030.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

21) Capacity Building Peningkatan Budaya Kerja Kepemimpinan

Sesuai dengan arah kebijakan Kepala BKKBN dalam pengembangan Sumber Daya Manusia BKKBN tentang revolusi mental, maka Pusdiklat KKB akan melaksanakan pelatihan yang berhubungan dengan perubahan budaya kerja dan revolusi mental bagi para struktural. Pelatihan ini memiliki sasaran para eselon II BKKBN baik di Pusat maupun Perwakilan Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan sasaran peserta sebanyak 100 orang selama 2 hari. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp 608.720.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

22) Training of Trainer (TOT) Diklat Teknis Program KKBPK bagi Pelatih (315 Orang)

Ada beberapa perubahan yang terjadi di operasional program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Untuk mengimplementasikan perubahan tersebut perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara bertahap mulai dari tingkat pusat dalam bentuk TOT. Adapun TOT yang akan dilaksanakan di Tahun 2015 ada 9 (sembilan) angkatan.

Kegiatan ini memiliki sasaran pelatih seperti Widyaiswara atau para pejabat struktural BKKBN Pusat dan Provinsi yang memiliki kemampuan memfasilitasi Diklat. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, tanya jawab dan praktik lapangan yang dilakukan dengan swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan rapat persiapan untuk mengidentifikasi materi dan sasaran peserta serta lokasi praktik lapangan. Selanjutnya adalah pengelolaan administrasi penyelenggaraan seperti pemanggilan peserta, permintaan pengajar untuk para pengajar dan persiapan untuk pelaksanaan lainnya.

Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dalam 3 (tiga) angkatan atau 315 orang di Kantor Pusat BKKBN pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 2.962.768.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

23) Training of Trainer (TOT) Regional Diklat Teknis bagi Master Trainer

Mengikuti perkembangan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga pada RPJMN 2015 – 2019, maka diperlukan peningkatan kompetensi bagi para pengelola program KKBPK di tingkat Pusat maupun Provinsi. Peningkatan kompetensi ini juga dibarengi dengan peningkatan kemitraan dengan instansi lain dalam pengembangan program KKBPK, terutama dalam pelaksanaan

diklat itu sendiri. Untuk itu pelatihan ini dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan perlu dilakukan pelatihan secara bertahap, dimulai dengan pembentukan master trainer yang akan melakukan pelatihan bagi para pelatih di tingkat Provinsi.

Kegiatan ini memiliki sasaran pelatih seperti Widyaiswara atau para pejabat struktural BKKBN Pusat dan Provinsi yang memiliki kemampuan memfasilitasi pengajar yang akan melatih. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah seminar, tanya jawab dan praktik lapangan yang dilakukan dengan swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan rapat persiapan untuk mengidentifikasi materi dan sasaran peserta serta lokasi praktik lapangan. Selanjutnya adalah pengelolaan administrasi penyelenggaraan seperti pemanggilan peserta, permintaan pengajar untuk para pengajar dan persiapan untuk pelaksanaan lainnya.

Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dalam 4 (empat) angkatan atau 160 orang di 5 regional, Aceh, Samarinda, Makasar, Bandung dan Jakarta pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 2.962.768.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

24) Diklat Teknis Substantive Program KKBPK Lini Lapangan

Sebagai tindak lanjut dari TOT Diklat Teknis Program KKBPK, akan dilaksanakan diklat teknis substantif Program KKBPK bagi pengelola Program di BKKBN Pusat. Kegiatan dilaksanakan dengan metode seminar, diskusi tanya jawab dan kunjungan lapangan melihat operasional program di lini lapangan. Tahapan penyelenggaraan dimulai dengan mengidentifikasi sasaran peserta dan materi substansi dan selanjutnya adalah pengelolaan administrasi penyelenggaraan Diklat. Kegiatan dilaksanakan selama 6 hari dalam 4 (empat) angkatan dengan total peserta 160 peserta dan lokasi kegiatan di daerah di Kantor BKKBN Pusat. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 644.800.000- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

25) Diklat Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Diklat (66 Orang)

Untuk menuju Diklat terakreditasi, maka seluruh unsur yang terkait perlu distandarkan sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah standarisasi pengelolaan Diklat bagi para pengelola Diklat. Kegiatan dilaksanakan dengan metode seminar, tanya jawab dan praktik lapangan. Tahapan mengenai pelaksanaan Diklat Teknis Pengelolaan Diklat (MOT) adalah diawali dengan identifikasi sasaran peserta Diklat, kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan administrasi Diklat seperti surat pemanggilan peserta.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kompetensi para pengelola Diklat, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara RI akan menyelenggarakan Diklat Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Diklat.

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah pada tahun anggaran 2016. Kegiatan ini akan dilaksanakan untuk 33 orang dalam 2 (dua) angkatan dengan total jumlah peserta sebanyak 66 orang. Kegiatan dilaksanakan di Kantor BKKBN Pusat

selama 10 hari. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 953.300.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

#### 26) Diklat Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Diklat

Untuk menuju Diklat terakreditasi, maka seluruh unsur yang terkait perlu distandarkan sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah standarisasi pengelolaan Diklat bagi para penyelenggara Diklat. Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kompetensi para penyelenggara Diklat, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara RI akan menyelenggarakan Diklat Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Diklat.

Kegiatan dilaksanakan dengan metode seminar, tanya jawab dan praktik lapangan. Tahapan pelaksanaannya diawali dengan identifikasi sasaran peserta Diklat, kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan administrasi Diklat seperti surat pemanggilan peserta.

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah pada tahun anggaran 2016. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 12 (dua belas) hari dalam 2 (satu) angkatan dengan total jumlah peserta sebanyak 66 orang. Kegiatan dilaksanakan di Kantor BKKBN Pusat. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.061.740.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

#### 27) Capacity Building Bidang Diklat

Dalam menindaklanjuti perubahan arah kebijakan diklat menuju revolusi mental untuk mengembangkan SDM Aparatur BKKBN, diperlukan perubahan dari para pengelola diklat itu sendiri. Dalam forum ini dilakukan perubahan mind set dan pembentukan perilaku para pengelola diklat untuk melakukan pekerjaan dengan cara berpikir yang dapat meningkatkan kinerja diklat secara keseluruhan.

Kegiatan ini juga merupakan forum yang strategis untuk kembali menyatukan langkah dan kesamaan persepsi para pengelola diklat untuk pengelolaan program diklat secara lebih efektif dan efisien.

*Capacity Building* ini dilaksanakan selama 3 hari dengan sasaran seluruh pengelola diklat BKKBN Pusat sebanyak 25 orang di Jawa Barat. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 437.300.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

#### 28) Pentaloa Nasional Program KKBPK

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tidak semata-mata hanya dilakukan oleh BKKBN, melainkan juga didukung oleh Pemerintah di Tingkat Provinsi sampai Kabupaten/ kota. Pentaloa Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang program KKBPK bagi para pemimpin di level Kabupaten/ kota terutama SKPD-KB, sekaligus meningkatkan komitmen untuk pelaksanaan program KKBPK di kabupaten dan kota.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari di provinsi pada tahun anggaran 2016. Sedangkan Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 573.700.000,- yang dibebankan pada anggaran tahun 2016.

29) Pelatihan Perubahan Mind Set (100 Orang)

Sesuai dengan arah program Presiden dan kebijakan Kepala BKKBN dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, perlu dilakukan revolusi mental. Revolusi ini dimulai dengan perubahan mind set yang salah satunya dapat dilakukan melalui pelatihan. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah seminar, diskusi, Tanya jawab dan internalisasi nilai-nilai perubahan yang akan dilakukan dengan sasaran pegawai BKKBN Pusat. Kegiatan ini dilakukan dengan swakelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB melalui pengiriman peserta ke Lembaga Diklat yang telah ditunjuk sesuai dengan perubahan yang diharapkan. Tahapan pelaksanaannya dimulai memilih provider yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, memilih peserta berdasarkan kriteria tertentu, persiapan pelatihan, penyelenggaraan, evaluasi dan penyelesaian secara teknis dan administrasi.

Pelatihan ini akan dilaksanakan untuk mengakomodir 100 orang peserta untuk dikirim ke lembaga diklat di dalam kota Jakarta secara bertahap pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 435.000.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

30) Pengembangan Metode Diklat

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional melalui diklat, diperlukan diklat yang juga sudah terstandarisasi. Untuk diperlukan pengembangan di berbagai sektor kediklatan.

Namun, pengembangan ini tidak dapat dilakukan diklat secara keseluruhan, sehingga memerlukan bantuan dari pihak professional lain untuk membangun sistem dan metode yang tepat. Kegiatan ini akan dibebankan pada RKA-KL Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 603.360.000,-

31) Pengembangan Diklat Outbond

Salah satu metode yang efektif dalam pendidikan dan pelatihan adalah dengan aplikasi langsung dari materi pelatihan ataupun dengan diklat metode pengajaran yang dilakukan di luar kelas. Untuk itu, Pusdiklat KKB akan mengembangkan diklat dengan basis praktek dan pengajaran di alam terbuka yang akan dibebankan pada RKA-KL Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 31.000.000,-

32) Rapat Persiapan dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan memerlukan beberapa tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan mulai dari persiapan yang mencakup penentuan metode yang akan digunakan dalam diklat sesuai kebutuhan, menentukan peserta, waktu pelaksanaan dan persiapan teknis serta administrasi lainnya. Tahapan ini memerlukan pertemuan dengan komponen terkait sehingga diklat dapat dilakukan sesuai sasaran yang diinginkan. Begitu juga dengan Evaluasi setelah penyelenggaraan diklat, sehingga kinerja pengelola diklat dapat dilihat melalui pengukuran atas hasil yang telah dicapai.

b Pendidikan Jangka Panjang (S2) dalam Negeri

1) Pendidikan Jangka Panjang (S2) dalam Negeri

Program pendidikan pasca sarjana ini bertujuan untuk meningkatkan SDM Pengelola Program KKBPK agar dapat memiliki kemampuan analisis yang baik, tangguh, dan berjiwa pemimpin untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan desentralisasi penyelenggaraan program KKBPK. Adapun hasil yang diharapkan dari program pendidikan pasca sarjana ini agar tersedianya SDM Tenaga Pengelola Program KKBPK yang memiliki kapasitas kemampuan akademis dalam mendukung proses desentralisasi penyelenggaraan program KKBPK.

Program ini juga merupakan lanjutan dari Program beasiswa pendidikan jangka panjang S2 pada tahun 2015 sebanyak 14 orang sekaligus penerima beasiswa pendidikan pada tahun 2016 sebanyak 10 orang. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.158.200.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

2) Seleksi Program Pendidikan Jangka Panjang

Untuk mendapatkan calon penerima beasiswa yang tepat sehingga tujuan pemberian pendidikan Jangka Panjang dapat tercapai, diperlukan tahapan-tahapan dalam pemilihan yang melibatkan beberapa pihak. Kegiatan ini dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 107.250.000,-

c Pendidikan Jangka Panjang (S3) dalam Negeri

- 1) Mempertimbangkan bahwa BKKBN sudah memiliki banyak SDM Aparatur dengan jenjang pendidikan minimal Paska Sarjana (S2), Pusdiklat Kependudukan dan KB mengembangkan peningkatan kemampuan akademis SDM Aparatur BKKBN ke jenjang lebih tinggi yaitu doktoral. Program ini telah didahului oleh perekrutan calon penerima beasiswa pada tahun 2015 sebanyak 4 orang. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 420.800.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016.

d Pelatihan bagi Tenaga Fungsional

1) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar dan Penjenjangan bagi Fungsional Tertentu

Setiap jabatan fungsional memiliki diklat tertentu yang dimulai dari dasar sebagai pembentukan dan diklat lainnya yang dilakukan secara rutin dalam jenjang tertentu. Pelatihan ini memiliki sasaran pejabat fungsional seperti auditor, peneliti, pranata humas, dan arsiparis di lingkungan kerja BKKBN. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah mengirimkan peserta ke Lembaga Diklat dari Instansi pembina pejabat fungsional yang dimaksud tersebut. Tahapan pelaksanaannya adalah diawali dengan penjadwalan jadwal penyelenggaraan Diklat dimasing-masing lembaga Diklat atau menerima usulan dari Biro Kepegawaian tentang diklat yang harus dilakukan fungsional tertentu dan kemudian mengirimkan peserta sesuai dengan Diklat yang diikuti. Total peserta yang akan mengikuti pelatihan ini

adalah 70 orang dengan total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 868.500.000,- yang dibebankan pada RKAK-KL tahun anggaran 2016.

2) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis bagi Fungsional Tertentu

Selain Diklat wajib yang diikuti oleh fungsional pada jenjang tertentu, para fungsional juga diupayakan untuk mengikuti diklat yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya. Pelatihan ini memiliki sasaran pejabat fungsional seperti auditor, peneliti, pranata humas, dan arsiparis di lingkungan kerja BKKBN. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah mengirimkan peserta ke Instansi pembina pejabat fungsional yang dimaksud tersebut atau lembaga diklat professional lain yang dapat memfasilitasi pelatihan kompetensi teknis yang dibutuhkan. Tahapan pelaksanaannya adalah diawali dengan peninjauan kebutuhan dari fungsional tertentu, menentukan lembaga diklat yang akan dituju, mengirimkan peserta sesuai dengan Diklat yang diikuti dan melakukan evaluasi serta diseminasi dari hasil pelatihan. Total peserta yang akan mengikuti pelatihan ini adalah 30 orang dengan total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 136.000.000,- yang dibebankan pada RKAK-KL tahun anggaran 2016.

3) Capacity Building Motivasi Berprestasi bagi Pelaksana Program KKBPK

Sebagai pelaksana program KKBPK di tingkat provinsi, diperlukan suatu penguatan dalam bentuk *capacity building* sebagai salah bentuk *up date* informasi mengenai program KKBPK terkini sekaligus memberikan penguatan motivasi untuk tetap melaksanakan pencapaian program KKBPK. Metode pelatihan akan dilaksanakan melalui seminar, diskusi, Tanya jawab dan juga internalisasi untuk motivasi.

Kegiatan ini dilaksanakan di 5 provinsi dengan total peserta 100 orang di masing-masing provinsi selama 2 hari efektif. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 406.000.000,- yang dibebankan pada RKAK-KL tahun anggaran 2016.

e Pelatihan E-Learning bagi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional

1) Program Loose Course UT

BKKBN bekerjasama dengan Univeritas Terbuka menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh melalui TI ini adalah supaya terpenuhinya kebutuhan SDM pengelola Program KKBPK yang memiliki kemampuan analisis yang baik, tangguh, dan berjiwa pemimpin untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan desentralisasi penyelenggaraan program KKBPK.

Waktu pelaksanaan Program Loose Course Terbuka (UT) ini adalah 2 semester tahun anggaran 2016 untuk 450 orang peserta. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.586.500.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2015.

2) Pelatihan Tutorial Pembelajaran e-Learning KKBPK

Sesuai dengan perkembangan teknologi, metode diklat juga mengikuti perubahan, dari diklat berbentuk klasikal melalui tatap muka di kelas menjadi diklat non klasikal dengan menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Metode diklat dengan cara ini dapat mencapai peserta latih yang lebih banyak dengan lokasi lebih jauh. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan program para pengelola Program KKBPK baik di BKKBN Pusat maupun BKKBN Perwakilan

Provinsi. Metode pelatihan tetap dilakukan melalui seminar, diskusi, Tanya jawab dan evaluasi secara *online* dan tatap muka.

Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan rapat persiapan untuk melakukan persiapan awal dalam pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya adalah pengelolaan administrasi untuk penyelenggaraan seperti pemberitahuan peserta e-learning untuk hadir dalam pelatihan tutorial, permintaan pengajar untuk para pengajar dan persiapan untuk pelaksanaan lainnya. Pelatihan ini akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 untuk 250 orang. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 174.870.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2015.

f Beasiswa bagi PKB/PLKB

BKKBN bekerjasama dengan Univeritas Terbuka menyelenggarakan program pendidikan sarjana ini adalah supaya terpenuhinya tenaga Penyuluh KB yang memiliki kemampuan analisis yang baik, tangguh, dan berjiwa pemimpin untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan desentralisasi penyelenggaraan program KKBPK..

Adapun tujuan daripada program pendidikan sarjana ini agar tersedianya tenaga Penyuluh KB yang memiliki kapasitas kemampuan akademis dalam mendukung proses desentralisasi penyelenggaraan program KKBPK. Pada tahun 2016 merupakan tahap penyelenggaraan beasiswa lanjutan tahun penerimaan 2014 sebanyak 500 orang. Waktu pelaksanaan Program Pendidikan Sarjana S1 Universitas Terbuka (UT) ini adalah selama 2 semester pada tahun anggaran 2016. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.012.000.000,- yang dibebankan pada RKA-KL tahun anggaran 2016

## **G. Pengembangan Standarisasi Balatbang dan Sertifikasi Pengelolaan Diklat**

### a. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Pengelola Diklat

#### 1) Capacity Building Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Pengelola dan Pelaksana Diklat

Kegiatan capacity building peningkatan kompetensi dan sertifikasi pengelola dan pelaksana Diklat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan mengidentifikasi sertifikasi pengelolaan Diklat para pengelola dan pelaksana dalam capacity building yang diselenggarakan dalam bentuk pertemuan seminar/workshop. Kegiatan ini sebagai wadah untuk mensinkronisasikan kebijakan Diklat dan peningkatan kompetensi para pengelola dan pelaksana Diklat. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan total peserta 100 orang. Anggaran yang dialokasikan sejumlah Rp. 693.130.000,-.

#### 2) Capacity Building Personil Diklat

Kegiatan capacity building personil Diklat bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kinerja personil Diklat dalam mengelola Diklat. Kegiatan dilakukan di luar kota dengan metode studi banding ke lembaga-lembaga Diklat yang prima dalam menyelenggarakan Diklat. Kegiatan dilaksanakan dalam 3 angkatan dengan alokasi anggaran Rp. 280.800.000,-. Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut adalah seluruh personil Diklat Pusat.

#### 3) Capacity Building Kedeputian Latbang

Kegiatan capacity building kedepujian Latbang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kinerja seluruh personil dikedepujian Latbang melalui metode outbound dengan difasilitasi oleh tenaga yang kompetensi dalam memfasilitasi outbound. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 angkatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 227.180.000,-.

b. Peningkatan Kompetensi Widyaiswara dalam Memfasilitasi Pelatihan

4) Training of Trainer (TOF) Substansi Diklat Teknis dan Berjenjang Pola Baru

Kegiatan TOF dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para Widyaiswara khususnya terhadap Diklat yang dikembangkan oleh LAN RI yaitu dengan pendekatan pola baru. Kegiatan ini sangat strategis untuk mempersiapkan tenaga Widyaiswara yang kompetensi dalam memfasilitasi Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Baru. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 angkatan dengan alokasi anggaran Rp. 333.100.000,-.

5) Peningkatan Kompetensi Teknis dan Spesialisasi Widyaiswara

Kegiatan peningkatan kompetensi teknis dan spesialisasi Widyaiswara bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan spesialisasi Widyaiswara Pusat dan Provinsi melalui kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Diklat Pemerintah dan Swasta yang berhubungan dengan substansi dengan spesialisasi Widyaiswara. Alokasi sasaran Widyaiswara yang dapat mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi teknis dan spesialisasi Widyaiswara tersebut sejumlah 45 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 310.450.000,-

c. Penyediaan Data Informasi Diklat Berbasis TI

6) Workshop peningkatan layanan data dan informasi SIDIKA

Kegiatan workshop peningkatan layanan data dan informasi SIDIKA bertujuan untuk meningkatkan komitmen para administrator atau operator SIDIKA dalam pelayanan terhadap data dan informasi kediklata melalui aplikasi SIDIKA. Kegiatan dilaksanakan diluar kantor dengan melibatkan instansi pembina Diklat yaitu LAN RI. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 angkatan dengan alokasi anggaran Rp. 477.756.000,-

7) Tutorial Aplikasi SIDIKA

Kegiatan tutorial aplikasi SIDIKA bertujuan untuk mensinkronisasikan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aplikasi SIDIKA dimasing-masing provinsi. Kegiatan dilaksanakan setiap triwulanan atau 4 kali dalam satu tahun. Anggaran yang dialokasikan adalah sejumlah Rp. 24.884.000,-.

8) Rapat Review Data Capaian Diklat

Kegiatan rapat review data capaian Diklat bertujuan untuk mensinkronisasikan data-data yang berkaitan dengan Diklat yang diselenggarakan oleh komponen di luar Pusdiklat KKB. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi diluar jam kantor dengan melibatkan dari komponen-komponen pelaksana Diklat diluar Pusdiklat KKB. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 20.700.000,-

## **H. Penyediaan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur dan Tenaga Program**

### **a. Penyusunan Pedoman yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional**

#### **1) Workshop Penyusunan Kebijakan Diklat**

Kegiatan Workshop penyusunan kebijakan Diklat bertujuan untuk merancang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Diklat Teknis maupun Fungsional Program KKBPBPK serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan manajemen Diklat. Kegiatan workshop dilaksanakan diluar kantor dengan mengundang beberapa mitra strategis terkait seperti LAN RI, Kemendag RI, Kemenkes RI, mitra kerja Diklat lainnya. Metode pelaksanaan kegiatan workshop adalah dengan diskusi kelompok dan penyajian-penyajian dari narasumber-narasumber yang dapat memberikan masukan terkait dengan substansi kebijakan Diklat. Sedangkan peserta yang terlibat dalam kegiatan workshop antara lain struktural dan fungsional dari Pusdiklat, wakil dari BKKBN Perwakilan Provinsi dan mitra-mitra kerja terkait. Kegiatan workshop dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan total anggaran sejumlah Rp. 179.200.000,-.

#### **2) Rapat Penyusunan Pedoman Diklat Teknis**

Kegiatan rapat penyusunan pedoman Diklat Teknis bertujuan untuk persiapan, tindak lanjut dan finalisasi kebijakan-kebijakan Diklat yang telah diinisiasi dalam pertemuan workshop atau arahan atau identifikasi kebutuhan. Kegiatan rapat penyusunan pedoman Diklat dilaksanakan dengan diskusi dan penyelesaian dokumen-dokumen. Peserta yang terlibat dari kegiatan rapat adalah struktural dan fungsional Pusdiklat, komponen terkait dan mitra kerja terkait dengan substansi kebijakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebanyak 60 kali dengan total anggaran Rp. 207.000.000,-

### **b. Penyusunan Kurikulum, Modul dan Media Pembelajaran Kediklatan dalam Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional**

#### **1) Penyusunan Rancang Bangun Kurikulum Diklat Kependudukan dan KB**

Kegiatan penyusunan rancang bangun kurikulum Diklat bertujuan untuk menyusun rancang kurikulum Diklat yang meliputi pengalaman-pengalaman belajar serta metode-metode pembelajaran yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Diklat. Kegiatan penyusunan dilaksanakan dengan diskusi dan paparan dari narasumber yang berkaitan dengan substansi Diklat yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Peserta yang terlibat dari kegiatan tersebut adalah struktural dan fungsional Pusdiklat KKB dan mitra-mitra terkait dari komponen BKKBN atau dari Intansi lainnya. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan dengan total anggaran Rp. 95.000.000,-.

#### **2) Rapat Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar Diklat**

Kegiatan rapat penyusunan kurikulum dan bahan ajar bertujuan untuk persiapan, tindak lanjut dan finalisasi kurikulum dan bahan ajar Diklat yang disusun pada kegiatan penyusunan kurikulum. Kegiatan ini untuk mendukung tim penyusun kurikulum dan bahan ajar dalam menyelesaikan kurikulum-kurikulum yang disusun. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 30 kali dengan peserta yang terlibat antara lain dari struktural dan fungsional Pusdiklat, komponen terkait serta mitra kerja terkait. Total anggaran yang dialokasikan sejumlah Rp. 362.250.000,-.

- 3) **Penyusunan Bahan Ajar Diklat**  
Kegiatan penyusunan bahan ajar Diklat bertujuan meningkatkan kualitas bahan ajar Diklat yang disusun oleh tim/penyusun bahan ajar Diklat. Kegiatan ini untuk mendukung tim/penyusun bahan ajar Diklat. Pelaksanaan dilakukan dengan cara diskusi dan pengerjaan bahan ajar Diklat. Peserta yang terlibat adalah tim/penyusun bahan ajar dan pengelola administrasi dari Pusdiklat. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 20 kegiatan dengan total pembiayaan sejumlah Rp. 38.400.000,-.
- 4) **Penyusunan Kurikulum Diklat Penguatan Program KKBPK Lini Lapangan**  
Kegiatan penyusunan kurikulum Diklat penguatan program KKBPK lini lapangan bertujuan untuk mengembangkan kurikulum-kurikulum Diklat yang berkaitan dengan penguatan program KKBPK di lini lapangan. Kegiatan dilakukan dengan bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi. Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Latbang dari Perwakilan BKKBN Provinsi yang memiliki inisiasi dalam pengembangan kurikulum Diklat Program KKBPK lini lapangan. Sementara Pusdiklat akan memperkuat dengan cara mementori penyusunan kurikulum yang dikembangkan oleh Provinsi agar sesuai dengan standar kurikulum. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebanyak 14 kali di provinsi dengan total anggaran Rp. 388.990.000,-.
- 5) **Ujicoba Kurikulum Diklat Penguatan Program KKBPK di Lini Lapangan**  
Kegiatan ujicoba kurikulum Diklat penguatan program KKBPK di lini lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi atau masukan mengenai hasil penyusunan kurikulum Diklat Teknis Program KKBPK lini lapangan sehingga kurikulum yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan dengan cara pengirimkan tim ujicoba ke pelaksanaan Diklat yang menjadi ujicoba. Kegiatan ujicoba juga akan bekerjasama dengan Bidang Latbang Provinsi. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan total anggaran sejumlah Rp. 407.400.000,-.
- 6) **Identifikasi Kebutuhan Diklat Program KKBPK**  
Kegiatan identifikasi kebutuhan Diklat Program KKBPK dilaksanakan bertujuan untuk mengali kebutuhan-kebutuhan Diklat baik secara makro dan mikro. Kegiatan dilaksanakan dengan menugaskan tim assesor identifikasi kebutuhan ke provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menggali informasi kepada sasaran langsung ataupun sasaran pendukung yang berkaitan dengan Diklat. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan diawali pertemuan penyusunan instrumen identifikasi dengan tim assesor. Total anggaran yang dialokasi untuk kegiatan ini adalah Rp. 121.610.000,-.
- 7) **Identifikasi Model Diklat Teknis**  
Kegiatan identifikasi model Diklat Teknis bertujuan untuk mendapatkan pola dan strategi Diklat yang inovatif dari Diklat-Diklat yang telah ada. Hasil dari indentifikasi model Diklat teknis akan menjadi dasar dalam pengembangan pola dan strategi Diklat. Kegiatan dilaksanakan dengan mengirimkan tim assesor indentifikasi model Diklat teknis ke lokasi identifikasi di provinsi yang terdiri dari Pusdiklat dan mitra kerja terkait. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan

diawali dengan pertemuan persiapan untuk menyusun instrumen indentifikasi. Total anggaran yang dialokasikan sejumlah Rp. 115.350.000,-.

- 8) **Workshop Penyusunan Kurikulum, Media dan Bahan Ajar**  
Kegiatan workshop penyusunan kurikulum, media dan bahan ajar dilaksanakan bertujuan untuk menghasilkan kurikulum, media dan bahan ajar terkait dengan Diklat teknis dan fungsional. Kegiatan dilaksanakan diluar kantor dengan metode diskusi, paparan dari narasumber dan mengerjakan kerangka kurikulum, media dan bahan ajar Diklat. Peserta yang terlibat dari kegiatan tersebut antara lain struktural dan fungsional Pusdiklat, komponen BKKBN terkait, wakil dari perwakilan Provinsi dan mitra kerja terkait. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan alokasi anggaran Rp. 402.800.000,-.
- 9) **Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi**  
Kegiatan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Diklat yang inovatif. Kegiatan dilakukan dengan mengkontrakan ke konsultan Diklat yang dapat membuat pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Media yang dikembangkan sebanyak 1 (satu) paket dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,-.
- 10) **Pengembangan Modul Serial Pembelajaran**  
Kegiatan pengembangan modul serial pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pembelajaran non tatap muka. Kegiatan dilakukan dengan mengkontrakan ke konsultan Diklat yang dapat membuat pengembangan modul serial pembelajaran. Modul dikembangkan sebanyak 1 (satu) paket dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,-.
- 11) **Pengembangan Perangkat Diklat**  
Kegiatan pengembangan perangkat Diklat bertujuan untuk meningkatkan perangkat Diklat baru yang inovatif yang berkaitan dengan substansi kompetensi aparatur. Kegiatan dilakukan dengan mengkontrakan ke konsultan Diklat yang dapat membuat pengembangan perangkat Diklat. Perangkat Diklat dikembangkan sebanyak 1 (satu) paket dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,-.
- 12) **Pengembangan Model Diklat**  
Kegiatan pengembangan perangkat Diklat bertujuan untuk meningkatkan strategi pembelajaran melalui Diklat baru yang inovatif yang berkaitan dengan substansi kompetensi aparatur. Kegiatan dilakukan dengan mengkontrakan ke konsultan Diklat yang dapat membuat pengembangan model Diklat. Model Diklat yang dikembangkan sebanyak 1 (satu) paket dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,-.
- 13) **Pencetakan Perangkat Diklat**  
Kegiatan pencetakan perangkat Diklat bertujuan untuk meningkatkan layanan ke pelanggan Diklat dalam memanfaatkan produk-produk Diklat yang meliputi kurikulum, baan ajar dan materi Diklat yang telah disusun atau dikembangkan.

Jenis perangkat yang dicetak masing-masing kurang 12 macam dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 360.000.000,-.

14) Penggandaan Media Pembelajaran

Kegiatan penggandaan media pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan layanan ke pelanggan dalam memanfaatkan produk-produk media pembelajaran untuk mengoptimalkan pembelajaran di Diklat. Jenis media yang akan dicetak 5 macam dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 172.000.000,-

**c. Pelaksanaan *Assessment* dalam Rangka Akreditasi**

a. Penyusunan Identifikasi Diklat Akreditasi

1. Workshop identifikasi Diklat Akreditasi

Kegiatan workshop identifikasi Diklat akreditasi bertujuan untuk merancang pola kerja kegiatan akreditasi Diklat serta unsur-unsur akreditasi yang dibutuhkan dalam *assessment*. Kegiatan dilaksanakan didalam kantor dengan mengundang narasumber yang kompetensi dalam melakukan persiapan dan mengidentifikasi unsur-unsur akreditasi. Kegiatan dilakukan dengan cara diskusi kelompok dengan struktural dan fungsional Pusdiklat serta tim jaga mutu Diklat yang ditunjuk. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan alokasi anggaran Rp. 90.140.000,-.

2. Identifikasi Akreditasi Diklat

Kegiatan identifikasi akreditasi Diklat bertujuan untuk memetakan kondisi Diklat seluruh Provinsi dan hasil dari identifikasi tersebut akan dikaji dalam kegiatan workshop identifikasi Diklat Teknis. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara mengirimkan tim asessor identifikasi ke seluruh provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 462.200.000,-.

b. Bimbingan Teknis Akreditasi

1) Bimbingan Teknik Akreditasi

Kegiatan bimbingan teknis akreditasi bertujuan untuk membimbing provinsi dalam menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi Diklat. Kegiatan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu mengirimkan tim ke provinsi untuk melakukan bimbingan teknis dan/atau mendatangkan administrator akreditasi Diklat Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melakukan bimbingan ke BKKBN Pusat. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan alokasi anggaran Rp. 148.640.000,-.

c. Monitoring dan Evaluasi Akreditasi

1) Analisis Pengelolaan Diklat Akreditasi

Kegiatan analisis pengelolaan Diklat Akreditasi Diklat bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan hasil monitoring dan evaluasi akreditasi di masing-masing provinsi. Pelaksanaan dilakukan didalam kantor melalui Video Conference (VICON) dengan melibatkan struktural dan fungsional Pusdiklat, tim jaga mutu Diklat dan LAN RI sebagai pembina akreditasi Diklat. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 57.140.000,-

2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Akreditasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi Diklat akreditasi bertujuan untuk mendapatkan gambar mengenai proses pelaksanaan persiapan akreditasi dan penilaian akreditasi di Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang menjadi sasaran akreditasi. Kegiatan dilaksanakan dengan mengirimkan tim asesor ke provinsi. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 141.880.000,-.

**d. Peningkatan Jejaring Kemitraan dan Kerjasama dalam Kediklatan**

a. Pelaksanaan MoU dalam pengembangan dan penyelenggaraan Diklat

1) Rakor Regional Kemitraan Diklat

Kegiatan rakor regional kemitraan Diklat bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga Diklat dalam menindaklanjuti kesepakatan yang telah disepakati diberbagai forum. Kegiatan ini dilaksanakan secara regional dengan mengundang peserta dari lembaga Diklat di masing-masing instansi-instansi pemerintah /swasta secara mandiri. Peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut adalah struktural dan fungsional dari Pusdiklat, Bidang Latbang dari Perwakilan BKKKBN Provinsi dan UPT. Balai Diklat serta mitra-mitra kerja dari lembaga Diklat pemerintah dan swasta. Kegiatan akan bekerjasama dengan LAN RI dan Kemendag RI. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 451.620.000,-.

2) Pertemuan Koordinasi/Kemitraan Internal BKKBN

Kegiatan pertemuan koordinasi/kemitraan internal BKKBN dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan komponen-komponen di BKKBN Pusat melalui diskusi-diskusi untuk merencanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan Diklat dan pengembangan Diklat. Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 46.080.000,-.

3) Pertemuan Koordinasi/Kemitraan Eksternal BKKBN

Kegiatan pertemuan koordinasi/kemitraan eksternal BKKBN dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan mitra-mitra kerja BKKBN Pusat melalui diskusi-diskusi untuk merencanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan Diklat dan pengembangan Diklat. Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 48.600.000,-.

4) Koordinasi Kedeputan Latbang

Kegiatan koordinasi kedeputan Latbang merupakan kegiatan koordinatif rutin yang bertujuan untuk mensinkronisasikan atara kebijakan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Diklat dan pengembangan. Kegiatan dilakukan sebanyak 4 kali yang merupakan pembagian tanggung jawab dengan komponen lain di kedeputan Latbang. Anggaran yang dialokasikan sejumlah Rp. 22.480.000,-.

5) Rapat Penyusunan Materi Kerjasama

Kegiatan rapat penyusunan materi kerjasama dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan dan penyelesaian materi-materi yang berkaitan dengan kerjasama Diklat dan pengembangan. Kegiatan dilakukan didalam kantor melalui diskusi dan pengerjaan-pengerjaan materi kerjasama Diklat dan pengembangan.

Kegiatan dilakukan sebanyak 10 kali dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 91.000.000,-

b. Mitra Kerja yang difasilitasi Program Diklat

1) Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Diklat Kependudukan dan KB

Kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama Diklat kependudukan dan KB dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan layanan kebutuhan penyelenggaraan Diklat atau fasilitasi materi Diklat. Kegiatan dilaksanakan dengan cara menugaskan tim/sesorang yang dapat mempromosikan dan memfasilitasi Diklat ke pelanggan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Kegiatan dilakukan sebanyak 6 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 90.720.000,-

2) Pengembangan model Kemitraan Diklat

Kegiatan pengembangan model kemitraan Diklat dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan model-model kemitraan Diklat yang efektif dan dapat terimplementasi untuk meningkatkan kualitas Diklat. Kegiatan dilakukan dengan cara kontrak ke konsultan yang dapat membuat model kemitraan Diklat yang efektif. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sejumlah Rp. 50.000.000,-.

e. **Waktu Pencapaian Keluaran:** Kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun, Januari s/d Desember 2016

Tahapan Kegiatan	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Peningkatan Kepuasan User (User/Pengguna Peserta Diklat) Atas Penyelenggaraan Diklat												
2. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional												
3. Pengembangan Standarisasi Balatbang dan Sertifikasi Pengelolaan Diklat												
4. Penyediaan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur dan Tenaga Program												
5. Pelaksanaan Assessment dalam Rangka Akreditasi												

Tahapan Kegiatan	BULAN												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6. Peningkatan Jejaring Kemitraan dan Kerjasama dalam Kediklatan													

f. Biaya yang diperlukan: Terlampir